UJIAN AKHIR SEMESTER PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Dosen Pengampu:

Assoc. Prof. Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.

Disusun Oleh:

Nama: Moch Asshafa Marwa Agishna

NIM: 51924147

PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL FAKULTAS DESAIN UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA 2025

DAFTAR ISI

1.	Jelaskan Menurut Anda apa pentingnya mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan d	li
perg	uruan tinggi!	. 1
2.	Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dan nilai demokrasi!	.2
3.	Sebutkan dan Jelaskan Empat (4) landasan pembangunan nasional!	.3
pand	Salah satu bentuk pendidikan kewarganegaraan adalah identitas nasional. Berikan langan Anda terkait dengan dinamika dan tantangan identitas nasional di Indoneisa,	
bese	rta dengan contoh kasusnya!	.4
5.	Resume Jurnal Kelompok	.5
DAF	TAR PUSTAKA	.8

1. Jelaskan Menurut Anda apa pentingnya mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi!

Jawab:

Pancasila Penting di selenggarakan di perguruan tinggi agar mahasiswa dapat berperan serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain: Gaya hidup, Nasionalisme, Peduli masa depan, Kesehatan mental bangsa, Penegakan Hukum, Pentingnya Kesadaran terhadap ideologi pancasila. Selain itu Pendidikan Pancasila memiliki Fungsi diantaranya:

- Mengembangkan potensi mahasiswa dalam pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai program studi.
- Menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang terencana.
- Mendorong mahasiswa untuk berkontribusi secara konstruktif dalam masyarakat, bangsa, dan negara.
- Berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan.

Selain itu juga, Pentingnya Pendidikan Pancasila Bagi Mahasiswa di lihat dari Aspek, Historis, Sosiologis, Yuridis, dan Politik.

Sumber Historis:

- Pembelajaran dari sejarah: Mahasiswa dapat mengambil hikmah dari peristiwa sejarah nasional dan internasional.
- Inspirasi pembangunan: Mendorong partisipasi dalam pembangunan sesuai dengan bidang studi.
- Peran aktif: Berkontribusi secara arif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Menghindari kesalahan sejarah: Berupaya tidak mengulangi kesalahan masa lalu.

Sumber Sosiologis:

- Sosiologi: Ilmu tentang kehidupan antarmanusia.
- Kajian utama: Latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial.
- Fokus: Masalah sosial, perubahan, dan pembaruan masyarakat.
- Pendekatan sosiologis: Mengkaji struktur, proses, dan perubahan sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Sumber Yuridis:

• Pendekatan yuridis: Mahasiswa berperan dalam mewujudkan negara hukum.

- Tujuan: Mewujudkan keteraturan sosial (social order).
- Hasil: Membangun kondisi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Landasan: Sesuai cita-cita para pendiri bangsa (Founding Father).

Sumber Politis:

- Pendekatan politik: Memahami fenomena politik sesuai nilai-nilai Pancasila.
- Tujuan: Mewujudkan kehidupan politik yang sehat.
- Fokus kajian: Menemukan nilai-nilai ideal sebagai pedoman politik.
- Konsep utama: Negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy*), dan distribusi sumber daya.

Urgensi Pancasila:

- Memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sebagai calon pemimpin di berbagai bidang.
- Menjawab tantangan dunia dengan membentuk warga negara yang berpengetahuan dan berkomitmen pada Pancasila.
- Mempersiapkan lulusan sebagai kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa.
- Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai lembaga negara, daerah, politik, bisnis, dan profesi lainnya.

2. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dan nilai demokrasi!

Jawab:

• Kebebasan atau persamaan (Freedom/Equality)

Kebebasan atau persamaan adalah dasar dari demokrasi. Kebebasan sendiri dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha yang dilakukan tanpa pembatasan dari penguasa.

(Tim Hukumonline, 2024)

Lebih lanjut, dengan prinsip persamaan, semua orang dianggap sama, dan memperoleh akses dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya; tanpa dibeda-bedakan. Namun, perlu diperhatikan bahwa kebebasan yang dikandung dalam demokrasi Pancasila ini tidak berarti *Free Fight Liberalism* yang marak

tumbuh di Barat, melainkan kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.

• Kedaulatan Rakyat (people's sovereignty)

Dalam konsepsi kedaulatan rakyat, kehendak rakyat dan kepentingan rakyat merupakan hakikat yang utama. Sehubungan dengan ini, ada dua hal yang hendak dicapai, yakni kecilnya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas pemerintahan.

- Berdasar ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.
- Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional, selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam UUD 1945, konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara
- Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terrumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut.

3. Sebutkan dan Jelaskan Empat (4) landasan pembangunan nasional! Jawab:

Landasan Konstitusional:

Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur seluruh aspek pembangunan nasional. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.

Landasan Idiil:

Pancasila sebagai dasar negara memberikan nilai-nilai moral dan etika yang harus diintegrasikan dalam setiap proses pembangunan. Pancasila menjadi pedoman dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Landasan Operasional:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMN dan RPJPD) adalah dokumen strategis yang merinci langkah-langkah konkret dan program-program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Ini mencakup alokasi sumber daya dan penjadwalan kegiatan.

Landasan Sosiologis:

Mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, termasuk budaya, adat istiadat, dan kebutuhan masyarakat. Landasan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan relevan dan dapat diterima oleh masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi dan dukungan publik.

4. Salah satu bentuk pendidikan kewarganegaraan adalah identitas nasional. Berikan pandangan Anda terkait dengan dinamika dan tantangan identitas nasional di Indoneisa, beserta dengan contoh kasusnya!

Jawab:

Identitas nasional adalah jati diri suatu bangsa yang menjadi pembeda dengan bangsa lain. Di Indonesia, identitas ini tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, Bahasa Indonesia, Bendera Merah Putih, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta kekayaan budaya dan keberagaman suku bangsa yang dimiliki.

Namun, seiring perkembangan zaman dan globalisasi, identitas nasional menghadapi berbagai tantangan. Salah satu yang paling terasa adalah pengaruh budaya asing terhadap gaya hidup anak muda. Dalam buku *Pendidikan Kewarganegaraan*, dijelaskan bahwa:"Globalisasi juga memberikan dampak banyaknya anak-anak muda Indonesia yang lebih menyukai budaya asing. Sebagai contoh Negara Jepang yang budayanya banyak digandrungi remaja-remaja Indonesia." (Eksistensi et al., n.d.)

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya pemahaman generasi muda tentang nilai-nilai kebangsaan. Banyak di antara kita yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya menjaga identitas nasional. Akibatnya, rasa bangga terhadap Indonesia bisa berkurang, dan jati diri bangsa pun menjadi rentan tergerus. Dalam buku *Pendidikan Kewarganegaraan*, dijelaskan bahwa:" Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan agar kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela Negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan pancasila. Semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia."(Eksistensi et al., n.d.)

Untuk menghadapi tantangan ini, peran pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sangat penting. Melalui pendidikan ini, generasi muda dapat memperkuat rasa cinta tanah air, memahami pentingnya toleransi, dan menumbuhkan kesadaran sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Dengan memperkuat identitas nasional, Indonesia akan tetap kokoh dalam keberagaman, dan siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati dirinya.

5. Resume Jurnal Kelompok

Jawaban:

Judul Jurnal:

Penyimpangan Ajaran di Pesantren Al-Zaytun Indramayu: Terhadap Nilai Pancasila

Nama Anggota Kelompok:

Dosen Pembimbing: Assoc. Prof. Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si. Naura Abida Sahidin, Khilda Qurrotal Ayuni, Azmi Ahmad Khoeruman, Ilen Rivaldo, Moch Asshafa Marwa Agishna

Pendahuluan:

Pesantren di Indonesia merupakan lembaga pendidikan yang memainkan peran penting dalam pendidikan keagamaan dan pembentukan karakter bangsa. Salah satu pesantren modern yang belakangan ini menuai kontroversi adalah Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Didirikan oleh Panji Gumilang pada tahun 1993, pesantren ini dikenal dengan luasnya lahan dan fasilitas yang mewah. Namun, beberapa tahun terakhir, pesantren ini menjadi sorotan publik akibat rekaman video yang menunjukkan praktik ibadah yang berbeda dari ajaran Islam pada umumnya, seperti posisi shaf laki-laki dan perempuan sejajar, adanya perempuan sebagai imam khutbah Jumat, serta salam yang dianggap menyimpang.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, terutama sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa", segala bentuk penyimpangan terhadap nilai agama maupun ideologi negara menjadi perhatian serius. Kasus ini kemudian menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, media, tokoh agama, hingga pemerintah.

Tinjauan Pustaka:

Dalam konteks ini, penting untuk meninjau kembali kedudukan pesantren dalam sistem pendidikan nasional dan relasinya dengan nilai-nilai Pancasila. Literatur dari Aini Shalihah (2023) membahas secara khusus kontroversi pesantren dalam kerangka hukum negara Pancasila. Selain itu, artikel dari Tempo dan BINUS menyoroti sejarah dan metode pengumpulan data mengenai persepsi masyarakat. Zainal Abidin (2023) juga menekankan perlunya pendekatan multidisipliner dalam menganalisis lembaga pendidikan yang menyimpang dari norma sosial dan keagamaan.

Hasil Pembahasan:

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik kuesioner tertutup kepada 32 responden untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap Al-Zaytun. Hasil utama yang diperoleh antara lain:

- 90% responden menganggap Al-Zaytun menyimpang atau sesat.
- 87,5% responden memperoleh informasi mengenai Al-Zaytun dari media sosial, sisanya dari televisi.
- 100% responden setuju bahwa Al-Zaytun menyalahgunakan kebebasan beragama yang tidak sesuai dengan Pancasila.
- 93,8% responden menyatakan pentingnya pendidikan karakter untuk mencegah penyimpangan.
- 96,9% responden menganggap kasus ini sebagai ancaman terhadap persatuan bangsa.
- 90,6% responden merasakan dampak negatif dari kontroversi ini terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam.
- 65,6% responden menilai kurikulum Al-Zaytun tidak sesuai dengan sistem pendidikan nasional.

Temuan ini menegaskan bahwa kasus Al-Zaytun menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan Islam dan membahayakan integritas ideologi Pancasila dalam praktik keagamaan.

Kesimpulan & Saran:

Kesimpulan:

Pesantren Al-Zaytun menjadi contoh nyata bagaimana penyimpangan ajaran dalam lembaga pendidikan dapat menimbulkan polemik besar di tengah masyarakat. Meskipun memiliki visi pendidikan yang maju dan fasilitas yang

lengkap, penyimpangan terhadap praktik ibadah dan nilai dasar negara membuat masyarakat kehilangan kepercayaan.

Saran:

Pemerintah, Kementerian Agama, dan MUI perlu melakukan pengawasan ketat terhadap kurikulum dan praktik keagamaan di setiap lembaga pendidikan Islam. Penguatan nilai-nilai Pancasila dan pendidikan karakter juga sangat penting untuk membentengi generasi muda dari penyimpangan ajaran yang dapat mengancam persatuan bangsa.

Daftar Pustaka:

Aini Shalihah. (2023). Kontroversi Al-Zaytun dalam Bingkai Negara Hukum Pancasila. Kompasiana.

https://www.kompasiana.com

Andika Dwi. (2023). Sejarah Berdirinya Ponpes Al-Zaytun. Tempo.

https://www.tempo.co

Putri, Vanesa Regina & Ferdianto. (2023). *Teknik Pengumpulan Data Kuesioner*. BINUS.

https://sis.binus.ac.id

Zainal Abidin. (2023). *Analisis Kontroversi Pendidikan Islam*. UIN Jakarta Repository.

https://repository.uinjkt.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- Eksistensi, P., Mahasiswa, K., & Kurniasih, D. (n.d.). *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*.
- Tim Hukumonline. (2024, August 16). *Mengenal Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila*. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-demokrasi-pancasila-lt650d676e5b50b/